

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Permasalahan normalisasi hubungan diplomatik dengan Korea Utara (*Democratic People's Republic of Korea*, DPRK), merupakan salah satu isu penting dalam kebijakan luar negeri Jepang pada era setelah Perang Dingin.<sup>1</sup> Sejak berakhirnya Perang Dunia II, Jepang dan Korea Utara tidak memiliki hubungan diplomatik resmi (formal) meskipun kedua negara memiliki kesamaan geografi, sejarah dan kebudayaan. Pada kenyataannya, Korea Utara adalah satu-satunya negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Jepang semenjak berakhirnya Perang Dunia II (Kim Hong, 2006, p.1).

Hubungan "*abnormal*"<sup>2</sup> antara Jepang dan Korea Utara ini membawa pengaruh yang besar pada saat Perang Dingin. Perang Dingin menempatkan kedua negara ini pada sisi yang berlawanan dalam "*Bipolar System*". Jepang menandatangani (bergantung) keamanan nasionalnya kepada Amerika Serikat yang dituangkan dalam Perjanjian Keamanan Jepang dan Amerika Serikat (*Japan-US Framework Agreement*). Kemudian, dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh Jepang terhadap Korea Utara juga mengikuti kebijakan-kebijakan yang dilakukan Amerika Serikat (Kim Hong, 2006, p.1).

Pada saat berakhirnya Perang Dingin, banyak permasalahan baru yang muncul diantara kedua negara. Seperti permasalahan kepemilikan Senjata Pemusnah Masal oleh Korea Utara, penculikan warga negara Jepang oleh Korea Utara, perdagangan kriminal yang dilakukan Korea Utara, perbatasan perairan

---

<sup>1</sup> Perang dingin adalah sebutan bagi sebuah periode dimana terjadi konflik, ketegangan dan kompetisi antara Amerika Serikat (dan sekutunya disebut Blok Barat) dan Uni Soviet (beserta sekutunya disebut Blok Timur) yang terjadi antara tahun 1947-1991. Kejadian yang berhubungan dengan Perang Dingin: Perang Vietnam, Perang Korea, Perang Soviet-Afganistan, Perang Sipil Kamboja, Perang Sipil Angola, Perang Sipil Yunani, Krisis Kongo, Runtuhnya Tembok Berlin, Revolusi Honggaria, Krisis Misil Kuba.

<sup>2</sup> Dikatakan "*abnormal*" (tidak normal) adalah karena kedua negara ini tidak memiliki hubungan diplomatik resmi antar kedua pemerintah meskipun kedua negara berada diwilayah yang berdekatan, yang seharusnya sebagai negara tetangga memiliki hubungan diplomatik yang resmi. Namun meskipun begitu, hubungan perdagangan non formal diantara kedua negara tetap terjalin. Perdagangan tersebut terjadi dikalangan pebisnis.

Jepang yang sering dimasuki oleh mata-mata negara Korea Utara dan sebagainya. Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan semakin sulitnya untuk memperbaiki hubungan kedua negara.

Bagi Korea Utara, permasalahan mendasar dari hubungannya dengan Jepang adalah mengenai permasalahan pendudukan (Imperialisme) yang dilakukan Jepang pada saat Perang Dunia II di Korea. Bagi Korea Utara, permasalahan ini harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum membuka hubungan diplomatik resminya dengan Jepang. Korea Utara juga meminta Jepang agar memberikan kompensasi (keuangan) perang sama seperti yang diberikan Jepang kepada Korea Selatan ketika membuka hubungan diplomatik pada tahun 1965. Namun bagi Jepang, permasalahan mendasar dalam hubungannya dengan Korea Utara adalah permasalahan mengenai kasus penculikan warga negaranya yang dilakukan oleh Korea Utara pada tahun 1970-an hingga 1980-an dan permasalahan mengenai Senjata Pemusnah Masal (*Weapons of Mass Destructions* [WMD]) yang dimiliki oleh Korea Utara.

Program WMD yang dikembangkan oleh Korea Utara merupakan isu Internasional yang melibatkan banyak negara. Isu ini menjadi agenda utama dalam *Six-Party Talks* antara Cina, Jepang, Rusia, Amerika Serikat, Korea Selatan dan Korea Utara. Korea Utara dilarang memiliki nuklir karena kepemilikan nuklir sebagai senjata bagi negara yang bukan merupakan Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB adalah merupakan sebuah kesalahan.<sup>3</sup>

Pengembangan WMD Korea Utara tersebut menjadi permasalahan bagi Jepang adalah karena dalam uji coba rudalnya, Korea Utara seringkali mengarahkan rudalnya ke wilayah Jepang. Tentu saja ini menjadi ancaman bagi Jepang karena menyangkut keselamatan bangsa dan negaranya. Permasalahan lainnya adalah isu mengenai penculikan warga negara Jepang yang dilakukan oleh agen rahasia Korea Utara pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Isu penculikan ini menjadi agenda utama Jepang dalam menjalin hubungan diplomatik resmi kedua negara. Khususnya, Jepang menginginkan pembicaraan mengenai normalisasi

---

<sup>3</sup> Anggota PBB: Cina, Perancis, Rusia, Inggris, Amerika Serikat. Kelima negara ini adalah negara-negara yang boleh memiliki senjata nuklir dibawah perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (perjanjian yang membatasi kepemilikan nuklir).

hubungannya dengan Korea Utara sejalan dengan penyelesaian masalah penculikan.

Di dalam masyarakat Jepang, permasalahan nuklir Korea Utara memang merupakan isu yang penting karena menyangkut keamanan dan stabilitas wilayahnya, tetapi masyarakat umum tidak merasakan “kenyataan” dari ancaman nuklir tersebut. Sedangkan permasalahan penculikan adalah masalah kemanusiaan yang harus segera diselesaikan, karena bagi Jepang permasalahan kemanusiaan adalah merupakan permasalahan utama. Oleh karena itu dukungan masyarakat bagi penyelesaian masalah penculikan ini sangat besar. Ini dibuktikan pada poling yang dilakukan oleh kabinet kerja pemerintahan Jepang pada bulan Oktober 2004, ketika diajukan pertanyaan apa yang harus ditekankan dalam hubungan Jepang dan Korea Utara, 88% dari masyarakat mengatakan adalah isu penculikan (*Japan and North*, 2005, p.10).

Dari dua isu utama yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk membahas mengenai isu penculikan warga negara Jepang oleh Korea Utara (*Racchi Jiken*). Karena isu ini tidak hanya menjadi permasalahan politik yang mempengaruhi normalisasi hubungan kedua negara, tetapi isu ini juga telah menjadi permasalahan nasional Jepang dimana masyarakat sangat menginginkan penyelesaian dari kasus tersebut.

Isu penculikan ini muncul pertamakali di Jepang pada tahun 1980. Namun selama bertahun-tahun isu ini tidak mendapatkan perhatian khusus, hanya menjadi perhatian dari keluarga para korban penculikan dan sedikit masyarakat. Isu ini mulai meluas di masyarakat pada tahun 1997, ketika muncul didalam sebuah artikel *Modern Korea* yang mengangkat kisah penculikan salah seorang korban (*Japan and North*, 2005, p.10). Jepang berusaha untuk mendapatkan informasi mengenai kebenaran berita tersebut. Walaupun Korea Utara selalu membantah tuduhan tersebut, Jepang terus mendesak.

Isu ini menemukan titik terang pada tahun 2002, pada saat Perdana Menteri Jepang Koizumi Junichiro mengunjungi Pyongyang (Ibu Kota Korea Utara) dalam agenda pembicaraan normalisasi hubungan kedua negara. Pada saat

itu, pemimpin Korea Utara, Kim Jong Il<sup>4</sup> mengakui bahwa pada tahun 1970-an hingga 1980-an tentara Korea Utara memang telah menculik warga negara Jepang sebanyak 13 orang (Diplomatic Blue Book 2003, 2003, p.6). Dan Kim Jong Il menyatakan kesediaannya untuk mendiskusikan hal ini dengan pemerintah Jepang. Namun data mengenai jumlah korban yang dimiliki Jepang ternyata berbeda dengan data yang diberikan oleh Korea Utara.

Usaha pencarian informasi mengenai korban penculikan pun dilakukan oleh pemerintah Jepang. Namun pencarian informasi mengenai kasus tersebut bukanlah hal yang mudah, karena pihak Korea Utara tidak memberikan informasi secara jelas. Korea Utara memberikan data bahwa 5 dari 13 korban dinyatakan masih hidup sedangkan yang lainnya telah meninggal dunia (Takahashi, 2002, p.41). Jepang meragukan data tersebut, karena Korea Utara tidak memberikan informasi secara rinci mengenai penyebab meninggalnya para korban tersebut.

Sulit bagi Jepang untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam hal penyidikan kasus tersebut. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya hubungan diplomatik resmi diantara keduanya dan disamping itu, hal ini juga disebabkan karena Korea Utara adalah negara yang sangat tertutup terhadap negara asing, sehingga sangat terbatas 'ruang gerak' bagi Jepang.

Salah satu cara yang dilakukan Jepang adalah dengan cara mengangkat permasalahan ini di dalam pertemuan antar kedua negara ataupun dalam pertemuan Internasional. Seperti dalam pertemuan *Six Party Talks* yang membahas mengenai pengembangan nuklir dan rudal Korea Utara juga dalam pertemuan G8, Jepang selalu meyisipkan desakan terhadap Korea Utara untuk segera menyelesaikan permasalahan penculikan tersebut (*Japan-North Korea Relations*, 2004, p.40-44).

Setiap permasalahan yang terjadi diantara suatu negara pastilah diselesaikan dengan melakukan diplomasi antar negara tersebut untuk dicari jalan keluarnya. Dan didalam diplomasi, cara yang dipergunakan adalah dengan cara

---

<sup>4</sup> Kim Jong Il adalah anak dari Kim Il Sung (Presiden pertama Korea Utara). Menjabat sebagai pemimpin Korea Utara sejak tahun 1994, menggantikan ayahnya. Kim diangkat menggunakan sistem dimana dialah satu-satunya calon pemimpin. Kim Jong Il yang mendapat julukan *Dear Leader* juga menjabat sebagai Ketua Komisi Pertahanan Nasional (kedudukan tertinggi di Korea Utara) dan Sekretaris Jendral Partai Pekerja Korea Utara. Hari kelahirannya dirayakan sebagai salah satu hari libur nasional di Korea Utara.

bernegosiasi sehingga akan mencapai kesepakatan bersama. Sir Harold Nicolson mengatakan bahwa ada empat bentuk (*style*) dalam negosiasi diplomatik klasik, yaitu: *Warrior* (Perang), *Machiavellian* (Intrik), *Manipulative* (Manipulasi) dan *Compromising* (Kompromi). Bentuk negosiasi Amerika, Rusia, Cina dan Inggris kurang lebih sama dengan empat bentuk yang diutarakan oleh Nicolson tersebut. Tetapi, bagaimanakah dengan bentuk diplomasi Jepang? Hampir dapat dikatakan bahwa Jepang tidak memiliki bentuk yang pasti dalam diplomasinya. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan seorang diplomat Jepang (Blaker, Giarra & Vogel, 2002, p.3).

“One Japanese diplomat, after reflecting on Nicolson’s typology, concluded that Japanese negotiating behavior could not be placed into any of the four groups. When asked why not, he dryly replied, “Because Japan has no style in the first place!”

Terjemahan: “Salah seorang diplomat Jepang, setelah melihat tipologi Nicolson tersebut, menyimpulkan bahwa negosiasi Jepang tidak berdasarkan pada empat kelompok tersebut. Ketika ditanyakan mengapa, ia menjawab, “Karena Jepang tidak memiliki bentuk yang ditempatkan pada prioritas pertama!”

Dari pernyataan diatas dapat ditafsirkan bahwa dalam melakukan diplomasi, Jepang tidak memiliki bentuk yang pasti atau bentuk utama dalam setiap diplomasinya. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimanakah diplomasi Jepang, terutama diplomasi yang dilakukan terhadap kasus penculikan warga negara Jepang oleh Korea Utara.

## 1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan dengan isu penculikan warga negara Jepang yang dilakukan oleh agen rahasia Korea Utara yang terjadi pada tahun 1970-an

hingga 1980-an. Masalah penculikan ini merupakan masalah yang serius di dalam negeri Jepang, sehingga penyelesaiannya merupakan hal yang penting. Namun, penyelesaian kasus penculikan ini bukanlah hal yang mudah. Karena baik Jepang dan Korea Utara tidak menemukan kesepakatan dalam bernegosiasi mengenai kasus tersebut.

Oleh karena itu, untuk membantu memfokuskan analisa dalam penelitian ini, masalah pokok yang diajukan adalah:

- Bagaimana melihat masalah penculikan warga negara Jepang oleh pihak Korea Utara dalam konteks dinamika hubungan Jepang-Korea Utara?
- Bagaimanakah metode diplomasi yang digunakan pemerintah Jepang dalam usaha bernegosiasi dengan Korea Utara dalam penyelesaian kasus penculikan?
- Seberapa berhasil upaya-upaya diplomasi tersebut?

### **1.3 Kemaknawian Penelitian**

Penelitian mengenai Jepang telah banyak dilakukan saat ini, namun penelitian mengenai hubungan diplomatik Jepang dengan Korea Utara masih belum banyak dilakukan. Hal ini kemungkinan diakibatkan oleh sulitnya untuk mendapatkan sumber, karena Korea Utara merupakan negara yang tertutup terhadap negara luar.

Penelitian ini tidak hanya melihat dari sudut pandang Jepang saja, tetapi juga akan melihat dari sudut pandang Korea Utara. Hingga kini permasalahan penculikan ini belum tuntas sepenuhnya, karena kedua negara masih menemui hambatan dalam penyelesaiannya. Melalui tulisan ini, penulis berharap dapat memberikan pemahaman baru mengenai hubungan Jepang dan Korea Utara dan dapat memperluas wawasan mengenai diplomasi Jepang bagi siapa saja yang membacanya.

#### **1.4 Tujuan dan Cakupan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan penculikan yang dilakukan oleh agen rahasia Korea Utara terhadap warga negara Jepang. Lebih dalam lagi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan apa yang dilakukan pemerintah Jepang dalam usaha mendapatkan informasi mengenai korban dan bagaimana diplomasi dan negosiasi yang dilakukan Jepang untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dalam penelitian ini juga akan membahas sejauh mana normalisasi hubungan Jepang dan Korea Utara terjalin dengan adanya kemajuan dalam isu penculikan.

Penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai diplomasi yang dilakukan Jepang terhadap Korea Utara dan sejauh mana normalisasi hubungan yang terjalin antara keduanya dengan berkembangnya isu penculikan tersebut.

#### **1.5 Metodologi Penelitian**

Metode merupakan cara yang ditempuh peneliti dalam menemukan pemahaman sejalan dengan fokus dan tujuan yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan. Menurut Dr.Maryaeni, M.Pd (2005, p.3), pendekatan kualitatif adalah “berusaha memahami *fact* yang ada dibalik kenyataan, yang dapat diamati atau di indra secara langsung.” Sedangkan metode kepustakaan yaitu dengan mengkaji buku-buku ilmiah serta bahan tulisan lainnya yang relevan dengan penelitian. Kemudian data yang didapat, dianalisa dengan teknik deskriptif interpretatif.

#### **1.6 Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah sebuah struktur yang digunakan dalam penulisan sebuah karya ilmiah agar tidak terjadi perluasan ulasan diluar tema pembahasan. Tulisan ini meneliti usaha-usaha yang dilakukan Jepang dalam menyelesaikan permasalahannya dengan Korea Utara berkaitan dengan isu penculikan warga negara Jepang oleh Korea Utara yang terjadi antara tahun 1970-an hingga 1980-an.

Permasalahan-permasalahan Internasional yang terjadi, pastinya diselesaikan dengan cara berdiplomasi diantara negara yang bersangkutan. Diplomasi tersebut dilakukan dengan bernegosiasi sehingga tercipta atau tercapai sebuah kesepakatan yang disetujui bersama. Berkaitan dengan penulisan tersebut, maka akan dibahas teori yang menjelaskan mengenai diplomasi dan negosiasi.

Dalam bukunya “Kiat Diplomasi”, Jusuf Badri mengutip perkataan Ch de Martens yang mengatakan bahwa diplomasi adalah:

“The science of external relations of foreign affairs of states, and more markedly, the science of art of negotiating” (Badri, 1993, p.19).

Terjemahan: Ilmu mengenai hubungan luar negeri atau masalah-masalah antara negara dan yang sebenarnya lebih merupakan ilmu ataupun seni berunding” (Badri, 1993, p.20).

Sedangkan menurut S.L Roy, diplomasi adalah:

“Seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara damai apabila mungkin, dalam berhubungan dengan negara lain. Apabila cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuannya” (1991, p.5).

Diplomasi mempunyai peranan besar dalam mengatur kebijakan-kebijakan Internasional. Banyak permasalahan yang dapat diselesaikan dengan diplomasi, karena diplomasi digunakan untuk mencari kesepakatan dengan saling memperhatikan kepentingan masing-masing negara.

Menurut Niccolo Machiavelli (Machiavellian), konsep diplomasi dapat dikelompokkan menjadi empat: (1) Perubahan; perubahan merupakan ‘kondisi objektif’ yang besar dari diplomasi (2) Ketakutan atau resiko (3) Kekuatan Negosiasi (4) Teknik tawar menawar (Wight, 1991, p. 189).



Dalam diplomasi, terdapat tujuan utama sebuah negara, yaitu untuk mempertahankan kepentingan dan menjaga keamanan dalam negeri sebuah negara. Hal ini dikatakan oleh Kautilya:

“Tujuan utama diplomasi adalah sebagai pengamanan kepentingan negara sendiri” (Roy, 1991, p.6).

Namun, selain pertimbangan keamanan, terdapat pertimbangan lain. Yaitu, memajukan ekonomi, perdagangan dan kepentingan komersial, perlindungan warga negara sendiri di negara lain, mengembangkan budaya dan ideologi, peningkatan prestise nasional, memperoleh persahabatan dengan negara lain, dan sebagainya.

Hingga kini, diplomasi telah berkembang terus menerus seiring dengan tatanan dunia yang selalu berubah. Dalam dunia yang terdiri dari sistem kenegaraan yang kompetitif, negara-negara bersaing satu sama lain untuk bertahan hidup, memajukan kepentingan nasional, berusaha untuk menguasai negara lain bahkan dapat menimbulkan peperangan. Disinilah letak fungsi diplomasi. Diplomasi digunakan untuk mendamaikan beragamnya kepentingan ini atau paling tidak dapat meredakan ego masing-masing negara, sehingga mencegah terjadinya konflik.

Jusuf Badri mengutip pendapat Lord Strang yang mengatakan fungsi diplomasi sebagai berikut:

“The primary function of diplomacy which is the quite and friendly settlement of international differences by intergovernmental discussion and negotiation, facilitated by good personal contacs and understanding” (Badri, 1993, p.24).

Terjemahan: “Fungsi utama diplomasi adalah menyelesaikan berbagai perbedaan Internasional dengan penuh ketenangan lagi bersahabat melalui diskusi serta perundingan, yang diperlancar

oleh hubungan-hubungan pribadi yang baik dengan saling pengertian.”

Dalam diplomasi, terdapat tiga pengelompokan dari fungsi diplomasi (Badri, 1993, p.25):

- **Negosiasi**

Fungsi diplomasi adalah berupa mengkomunikasikan apa yang dikehendaki pemerintah dari pemerintah setempat, dan begitu pula sebaliknya, maka kemampuan dan keterampilan bernegosiasi ataupun berdiskusi adalah merupakan kemutlakan yang tidak dapat ditawar. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa negosiasi adalah merupakan fungsi diplomasi yang utama. Sebab mencapai tujuan nasional dengan “*agreement*”, dengan persetujuan bersama, jauh lebih aman serta lebih menguntungkan daripada dengan paksaan dan kekerasan.

- **Observasi**

Mengamati segala apa saja yang terdapat serta terjadi di negara tempat bertugas dan kemudian melaporkannya kepada pemerintah. Tentunya hal ini disertai komentar serta pendapat, baik dari segi yang menguntungkan maupun merugikan, sehingga pemerintah dan Menteri Luar Negeri memiliki informasi yang siap pakai dan akurat. Hal ini sangat penting bila suatu waktu pihak yang berwenang bersangkutan ingin merumuskan suatu kebijaksanaan dalam soal-soal yang terkait. Pasal 3 ayat 1 *d Vienna Convention on Diplomatic Relation* 1961 menyebutkan:

“Ascertaining by all lawful means condition and developments in the receiving state and reporting there on to the sending state.”

Terjemahan: “Berusaha mendapatkan secara sah semua bahan mengenai keadaan serta pembangunan negara penerima, dan kemudian melaporkannya ke negara pengirim.”

- Perlindungan

Perwakilan negara (Duta Besar) berkewajiban melindungi sesama warga negara serta hak milik mereka. Jika warga negara meminta pertolongan maka perwakilan negara wajib memberikannya dalam batas-batas kekuasaannya sejauh diperkenankan hukum antar negara (*International Law*). Misalnya jika warga negaranya dirugikan oleh salah satu badan ataupun lembaga dari negara lain, maka Duta Besar dapat memberikan perlindungan diplomatik kepada mereka berupa tuntutan ganti rugi melalui saluran diplomatik.

Dalam berdiplomasi, setiap negara mempunyai cara masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dari persoalan yang ada. Menurut S.L Roy, ada beberapa bentuk diplomasi, yaitu diplomasi Komersial, Demokratis, Totaliter, melalui Konferensi, Diam-diam, Preventif dan Sumberdaya (1991, p.119-174).

- Diplomasi Komersial

Diplomasi yang dilakukan dengan cara bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan. Diplomasi ini dikaitkan dengan faktor ekonomi.

- Diplomasi Demokratis

Diplomasi demokratis adalah diplomasi terbuka. Keputusan-keputusan yang akan diambil oleh pemerintah mengikuti keinginan publik.

- Diplomasi Totaliter

Diplomasi yang dalam membuat keputusan tidak berada dibawah pengawasan rakyat.

- Diplomasi Melalui Konferensi

Diplomasi yang diselenggarakan dengan cara pertemuan konferensi antar petinggi negara untuk membicarakan permasalahan-permasalahan yang terjadi.

- Diplomasi Diam-Diam

Diplomasi ini sangat erat dikaitkan dengan diplomasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diplomasi ini bukanlah diplomasi secara rahasia, tetapi diplomasi yang menggunakan metode diplomatik publik dengan bentuk-bentuk diplomasi yang lebih diam.

- **Diplomasi Preventif**  
Diplomasi ini adalah diplomasi dengan “berlindung” pada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Digunakan untuk mencegah perselisihan yang terjadi di negara lain agar tidak sampai masuk ke dalam negerinya.
- **Diplomasi Sumberdaya**  
Diplomasi ini digunakan oleh sebuah negara yang memiliki hasil sumberdaya alam yang besar. Hasil sumberdaya alam ini digunakan sebagai tawaran dalam bernegosiasi dengan negara lain untuk memperoleh keuntungan.

Dalam diplomasi, cara yang dilakukan untuk mencapai sebuah kesepakatan adalah dengan cara negosiasi atau berdiskusi dengan pihak lawan. Negosiasi dilakukan untuk menghindari hal-hal kekerasan yang mungkin dapat terjadi bila negosiasi tidak dilakukan.

Diakui secara luas bahwa salah satu cara untuk melakukan diplomasi adalah negosiasi. Hal ini ditegaskan oleh Harold Nicholson yang dikutip oleh S.L Roy:

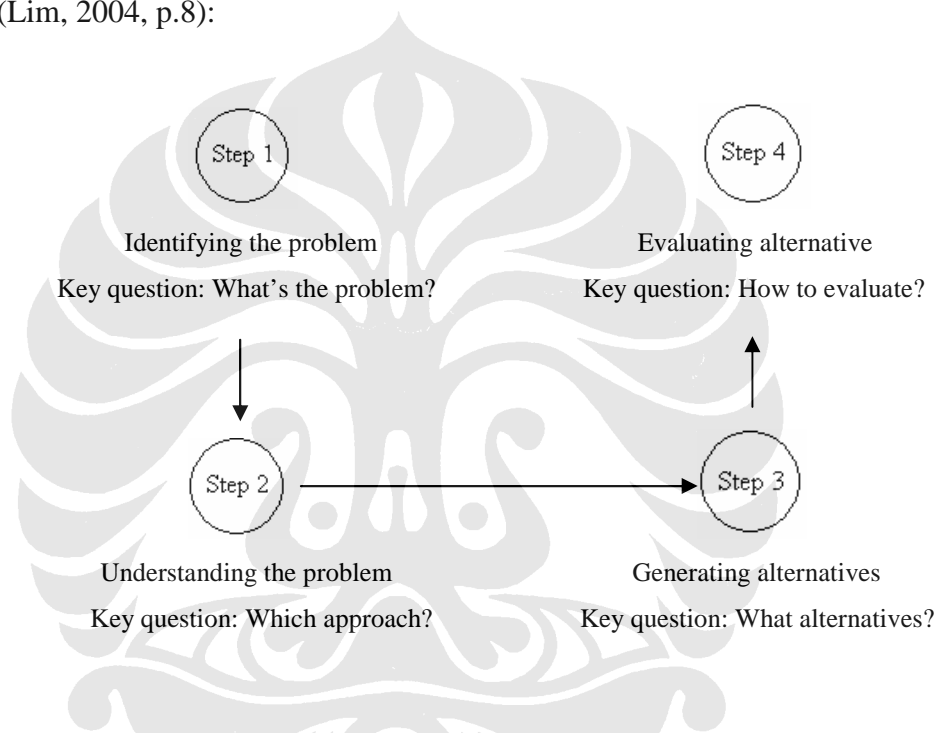
“Diplomasi menunjukkan lima hal yang berbeda. Yaitu politik luar negeri, negosiasi, mekanisme pelaksanaan negosiasi tersebut, dan dinas luar negeri. Sedangkan yang kelima merupakan suatu kualitas abstrak pemberian, yang dalam arti baik mencakup keahlian dalam pelaksanaan negosiasi Internasional sedangkan dalam arti yang buruk mencakup tindakan taktik yang lebih licik” (1991, p.3).

Diplomasi mempunyai ruang lingkup menyelesaikan perbedaan-perbedaan dan menjamin kepentingan-kepentingan negara melalui negosiasi yang sukses. Negosiasi merupakan suatu proses antara dua orang atau dua kubu untuk mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan dengan elemen-elemen kerjasama dan kompetisi. Menurut Tan Joo Seng dan Elizabeth NK Lim, negosiasi adalah:

“Form of social interaction in which parties who are interdependent try to resolve incompatible or divergent goals” (2004, p.5).

Terjemahan: “Bentuk dari interaksi sosial didalam kelompok yang mencoba untuk memecahkan ketidak cocokan atau perbedaan.”

Dalam melakukan negosiasi, ada empat strategi yang harus dilakukan (Lim, 2004, p.8):



Menurut Hugo Grotius (Grotian), dalam melakukan negosiasi diplomasi yang sukses, terdapat dua kondisi, yaitu (1) Material dan Fisik; kemungkinan bagi sebuah negara yang berhubungan untuk melakukan suatu perjanjian pada posisi yang sama. (2) Moral; kemungkinan bagi sebuah negara untuk saling pengertian dan percaya (Wight, 1991, p.180).

Immanuel Kant (Kantilian) dalam teorinya menyatakan bahwa pentingnya *Public Opinion* dalam pertahanan negara dan dalam kebijakan luar negeri. Menurut Kant, tanpa adanya publikasi tidak akan ada keadilan, dimana hal tersebut hanya akan “mampu dibuat oleh *public*”. Menurutnya, prinsip dasar dalam membuka diplomasi adalah saling terbuka dan meletakkannya pada *Perceptual Peace*. Kant

juga mengatakan bahwa politik dan moral harus menyatu (harmonis) (Wight, 1991, p. 198-199).

Dari teori diplomasi dan negosiasi yang telah dijelaskan diatas, maka dalam tulisan ini akan meneliti diplomasi dengan cara bernegosiasi apakah yang digunakan Jepang dalam melakukan diplomasinya dengan Korea Utara.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Tulisan ini diuraikan dalam lima bab. Bab I merupakan Pendahuluan yang memberikan gambaran mengenai latar belakang, rumusan pokok dan masalah penelitian, kemaknawian penelitian, tujuan dan cakupan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas mengenai sejarah hubungan Jepang-Korea Utara dan normalisasi hubungan kedua negara tersebut. Pada awal bab ini akan dibahas mengenai sejarah hubungan kedua negara, sejarah Jepang di Korea dan juga mengenai Perang Korea. Dan selanjutnya menjelaskan mengenai normalisasi hubungan kedua negara.

Bab III akan membahas mengenai penculikan warga negara Jepang oleh Korea Utara. Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang kasus penculikan, pengungkapan kasus dan kasus-kasus yang terjadi seputar masalah penculikan tersebut.

Bab IV berisi bahasan mengenai diplomasi Jepang dalam menghadapi masalah penculikan. Pada bab ini, akan dilihat kebijakan yang dilakukan Jepang dalam usaha pencarian informasi dan pengembalian para korban. Pembahasan utama dalam bab ini adalah mengenai negosiasi yang dilakukan Jepang terhadap Korea Utara.

Bab V adalah bab akhir yang merupakan kesimpulan. Dalam bab ini berisi kesimpulan dari masalah-masalah yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya.